

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Nilai signifikansi kualitas aparatur daerah sebesar $0,000 < 0,05$, nilai signifikansi sistem informasi manajemen menunjukkan sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai signifikansi Komitmen Organisasi menunjukkan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan barang Milik Daerah. Nilai signifikansi variabel independen menunjukkan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survey melalui penyebaran kuisisioner juga perlu melakukan wawancara lebih mendalam dan juga disarankan, untuk memperluas sampel agar mendapatkan hasil

yang konsisten. Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan juga untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah. Variabel yang bisa ditambahkan misalnya Motivasi Kerja terhadap pengelolaan barang milik daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara juga diharapkan agar selalu meningkatkan pengelolaan barang milik daerahnya, seperti melakukan pemanfaatan pada barang milik daerah yang tidak digunakan dalam tupoksi dalam rangka peningkatkan pendapatan daerah.